

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, isu lingkungan menjadi perhatian utama dalam dunia bisnis, mendorong perhatian lebih besar terhadap isu-isu pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam operasionalnya, perusahaan sering kali mengabaikan dampak yang mereka timbulkan, yang dapat membahayakan kondisi lingkungan sekitar termasuk keberlanjutan sumber daya yang ada (Ulfah & Hidayat, 2023). Hal ini dikarenakan tujuan awal didirikannya suatu perusahaan ialah menghasilkan keuntungan sebesar mungkin dan memberikan informasi tentang kinerja keuangan yang baik kepada para pemangku kepentingan, tanpa memperhatikan dampak apa saja yang telah mereka hasilkan dari kegiatan operasionalnya. John Elkington (1988) menjelaskan terkait konsep *Triple Bottom Line*, yakni konsep di mana tujuan suatu bisnis kini tidak hanya fokus pada mencari keuntungan, melainkan juga harus fokus pada tanggung jawab terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Sehingga, kini perusahaan wajib menyajikan informasi terkait aspek-aspek sosial dan lingkungan, selain menyajikan informasi terkait aspek finansial mereka (Mujiani & Jayanti, 2021).

Sebuah laporan yang mencakup informasi non-keuangan, seperti informasi sosial dan lingkungan dari operasi perusahaan, selain informasi kinerja keuangan, dikenal sebagai laporan keberlanjutan atau *sustainability report* (Perbiyanti, 2023). Bisnis dapat memahami, mengukur, dan menginformasikan pemangku kepentingan

tentang implikasi ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan menggunakan *sustainability report* (Perbiyanti, 2023). Para pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah, media, pelanggan, dan akademisi, menggunakan *sustainability report* sebagai standar untuk mengukur dedikasi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan (Ulupui et al., 2023). Untuk mencapai kesuksesan jangka panjang, menjaga keberlanjutan, dan memacu pertumbuhan, kemampuan perusahaan untuk menyampaikan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungannya secara efektif melalui *sustainability report* dipandang sangat penting (Aini & Subardjo, 2018).

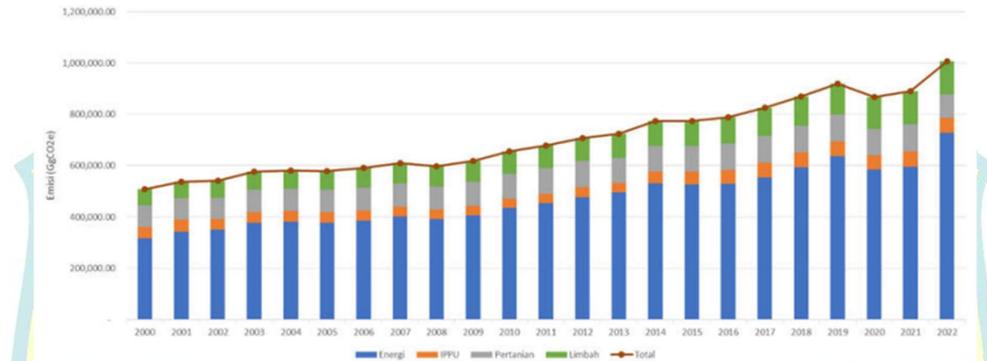
Laporan keberlanjutan dapat memperbaiki citra perusahaan di mata masyarakat dan pemangku kepentingan, sebagai sarana penyampaian informasi yang lebih lengkap kepada pemangku kepentingan, alat evaluasi kinerja perusahaan, serta memberikan keyakinan kepada investor bahwa manajemen perusahaan memiliki komitmen keberlanjutan, sehingga dapat menarik minat investor untuk berinvestasi (Hapsari, 2023). Pengungkapan keberlanjutan oleh perusahaan juga dapat membantu perusahaan memperoleh legitimasi dari masyarakat di sekitar lokasi operasionalnya, sehingga perusahaan dapat menghindari berbagai isu yang berpotensi menghambat kelangsungan aktivitas bisnisnya (Dewi, 2018, dalam Ulfah & Hidayat, 2023). Sebaliknya, perusahaan yang tidak mengungkapkan *sustainability report* dapat dianggap melakukan kerusakan lingkungan atau kurang bertanggung jawab terhadap dampak operasionalnya, sehingga berpotensi merusak citra perusahaan dan dapat berujung pada sanksi dari pemerintah maupun masyarakat yang berpotensi merugikan perusahaan (Ulfah & Hidayat, 2023).

Untuk meningkatkan kesadaran perusahaan akan tanggung jawabnya, Indonesia telah mewajibkan perusahaan yang kegiatan usahanya berhubungan dengan penggunaan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, melalui UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas”, Pasal 74 ayat 1. Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang “Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik”, yang menekankan pentingnya pengelolaan bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kemudian OJK mengeluarkan Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.04/2021, yang memberikan panduan lebih rinci mengenai bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Adanya regulasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong transparansi dan keberlanjutan praktik bisnis di Indonesia.

Sektor energi sebagai salah satu sektor strategis yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional maupun global, mencakup perusahaan yang bergerak dalam penjualan produk dan layanan terkait dengan ekstraksi energi, termasuk energi tak terbarukan (Indonesia Stock Exchange, n.d.). Di balik perannya dalam mendukung perekonomian nasional maupun global, kelangsungan bisnis sektor energi memiliki keterbatasan yang signifikan akibat sumber daya yang terbatas (*limited resources*). Sumber daya energi tak terbarukan seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara memiliki keterbatasan secara alamiah, di mana setelah habis dimanfaatkan, proses regenerasinya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tingkat eksploitasi yang tidak terkontrol, tidak hanya mengancam ketersediaan sumber daya di masa depan, tetapi juga memperbesar dampak negatif

terhadap lingkungan, sehingga semakin memperkuat urgensi transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan (Kuttab Digital, 2025).

Dalam konteks keberlanjutan, sektor energi memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengungkapkan *sustainability report* dibandingkan sektor lainnya yang tidak memberikan dampak secara langsung dan signifikan terhadap lingkungan. Hal ini disebabkan oleh tingginya kontribusi sektor energi terhadap isu-isu keberlanjutan salah satunya isu pencemaran lingkungan.



Gambar 1.1 Profil Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional tahun 2000-2022

Sumber: Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV (2024)

Menurut Kementerian PPN/ Bappenas (2022), sektor energi menjadi salah satu sektor penyumbang emisi karbon terbesar, menyumbang hingga 36% dari total emisi GRK dunia. Selain menjadi salah satu sektor penyumbang emisi karbon terbesar di dunia, sektor energi juga menjadi kontributor utama yang memberikan sumbangan terbesar terhadap total emisi nasional. Gambar 1.1 menunjukkan tren peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia tahun 2000-2022, di mana emisi GRK dari sektor energi mengalami peningkatan sebesar 22% pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh peningkatan pembakaran

bahan bakar, khususnya batu bara. Pada tahun tersebut, sektor energi menyumbang sekitar 59% dari total emisi dan penyerapan GRK nasional.

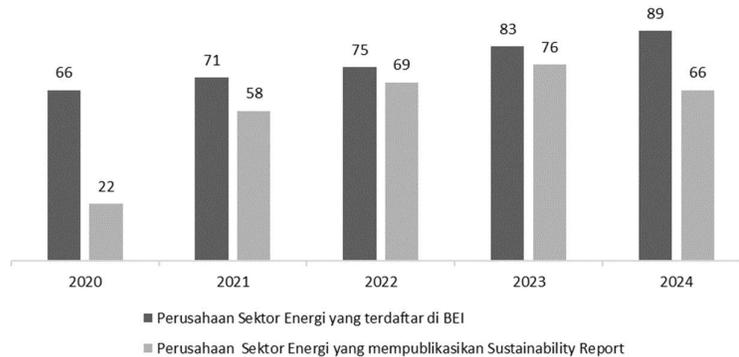
Tabel 1.1 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 2023

Sektor	Pengelolaan Limbah B3		
	Jumlah Perusahaan	Limbah yang dihasilkan	Limbah yang dikelola
Manufaktur	4.808	14.751.640	9.737.057
Agroindustri	3.437	3.008.362	2.930.616
Pertambangan, Energi, dan Migas	1.362	58.525.950	53.727.880
Prasarana/Infrastruktur	2.741	376.416	155.811
Jasa	679	4.378.330	3.228.686
Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.461	573.896	85.658

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Lebih jauh lagi, sektor pertambangan, energi, dan migas menjadi perhatian utama dalam hal pelaporan keberlanjutan, mengingat tingginya volume limbah B3 yang dihasilkan. Tabel 1.1 menunjukkan data Pengelolaan Limbah B3 tahun 2023 yang dilaporkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana sebanyak 1.362 perusahaan sektor pertambangan, energi dan migas menghasilkan limbah B3 sebanyak 58.525.950 pada tahun 2023, menjadikan sektor tersebut sebagai penyumbang limbah B3 terbanyak di Indonesia.

Tingginya kontribusi sektor energi terhadap pencemaran lingkungan, meningkatkan tekanan dari pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, investor, dan masyarakat, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam *sustainability report* sebagai wujud tanggung jawab terhadap dampak ekologis yang mereka hasilkan. Dengan adanya tekanan dari regulasi dan berbagai pihak, mendorong semakin banyak perusahaan sektor energi yang melakukan praktik keberlanjutan sebagai bagian dari strategi bisnis mereka.

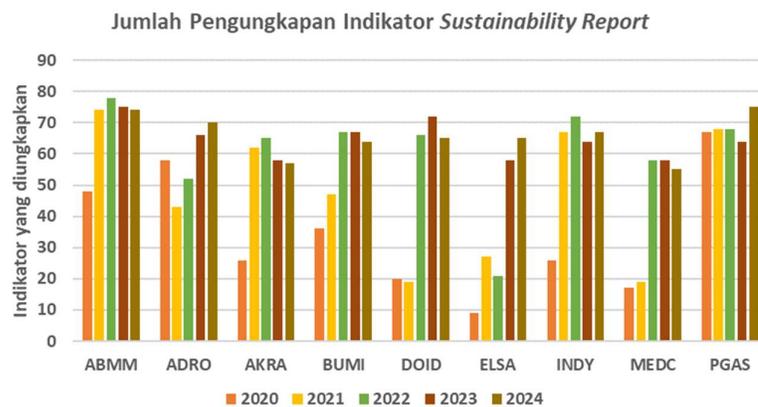


Gambar 1.2 Perbandingan Perusahaan Sektor Energi yang melakukan publikasi *Sustainability Report* (SR) periode 2020-2024

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

Perkembangan pengungkapan *sustainability report* oleh perusahaan-perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI sepanjang periode 2020–2024 ditunjukkan pada Gambar 1.2. Secara umum, jumlah perusahaan yang merilis *sustainability report* telah meningkat secara signifikan. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2021, di mana penerapannya sudah bersifat *mandatory* dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tren positif ini menunjukkan bahwa perusahaan sektor energi mulai berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap dampak yang mereka hasilkan dari kegiatan operasionalnya dalam *sustainability report*. Namun, di balik tren peningkatan pengungkapan *sustainability report* oleh perusahaan sektor energi, pada kenyataannya masih terdapat perusahaan yang tidak konsisten dalam merilis *sustainability report* setiap tahunnya. Sebagai contoh, PT Ratu Prabu Energi Tbk melaporkan *sustainability report* pada tahun 2021, 2023, dan 2024, tetapi tidak melaporkan pada tahun 2022 (sumber www.ratuprabuenergi.com). Contoh lainnya adalah PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk, yang berdasarkan data pada situs web BEI, perusahaan terakhir kali menerbitkan *sustainability report* pada tahun 2022.

Selain itu, beberapa perusahaan di sektor energi yang secara rutin merilis *sustainability report* dari tahun 2020 hingga 2024, ternyata masih mengungkapkan jumlah indikator berfluktuasi setiap tahun, seperti yang terlihat pada Gambar 1.3 di bawah ini.



Gambar 1.3 Jumlah Indikator Pengungkapan *Sustainability Report* Perusahaan Sektor Energi Tahun 2020-2024

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Meskipun demikian, penilaian terhadap perusahaan yang belum menerbitkan *sustainability report*, tidak konsisten dalam pelaporannya, atau mengungkapkan indikator secara fluktuatif, tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan rendahnya kesadaran terhadap isu keberlanjutan maupun kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Pengungkapan *sustainability report* merupakan sebuah kebijakan strategis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun faktor eksternal. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kemungkinan adanya kendala operasional maupun pertimbangan lainnya yang memengaruhi praktik *sustainability report* yang dijalankan perusahaan. Beberapa faktor yang sering menjadi fokus dalam analisis antara lain ketersediaan sumber daya pendukung serta mekanisme tata kelola perusahaan yang diterapkan. Tata kelola

perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas dipilih sebagai penentu studi tentang bagaimana pengaruh terhadap perusahaan dalam menyediakan *sustainability report*.

Salah satu pendorong utama pengungkapan *sustainability report* adalah profitabilitas, yang berfungsi sebagai sarana untuk menginformasikan para pemangku kepentingan tentang imbal hasil yang diharapkan (Damayanty et al., 2022). Menurut Kasmir (2018), profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Mujiani & Jayanti (2021) menyatakan bahwa pengungkapan informasi perusahaan, termasuk *sustainability report*, meningkat seiring dengan profitabilitasnya. Hal ini menggambarkan kewajiban perusahaan terhadap para kontributor keberlanjutan bisnisnya. Bisnis yang berkinerja baik secara finansial sering dianggap mampu memenuhi harapan kreditor dan investor serta memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam menyajikan informasi kepada para pemangku kepentingan (Putra et al., 2023).

Namun, menurut Perbiyanti (2023), Hermawan & Sutarti (2021), dan Ebenhaezer & Rahayu (2022), pengungkapan *sustainability report* dipengaruhi secara negatif oleh profitabilitas yang tinggi. Bisnis dengan profitabilitas tinggi tidak selalu menggunakan *sustainability report* untuk mengungkapkan kewajiban sosial, ekonomi, dan lingkungan mereka. Hal ini disebabkan perusahaan akan lebih fokus dalam menyajikan informasi kinerja keuangan mereka yang baik kepada para kreditor dan investor. Sedangkan, Marsuking (2020), Afifah et al. (2022), dan Gunawan & Sjarief (2022) berpendapat bahwa tinggi rendahnya tingkat

profitabilitas suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Di samping tinggi rendahnya tingkat profitabilitas, besar kecilnya ukuran perusahaan juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan informasi terkait keberlanjutan. Perusahaan besar cenderung mendapatkan perhatian dan tekanan lebih dari para pemangku kepentingan, karena diharapkan dapat berkontribusi terhadap masyarakat melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan. *Sustainability report* merupakan contoh nyata dari tanggung jawab sosial dan lingkungan (Yunan et al., 2021). Teori legitimasi mengaitkan ukuran perusahaan dengan tingkat pengungkapan *sustainability report*, di mana perusahaan dengan ukuran besar dianggap memiliki sumber daya yang mendukung mereka dalam menjalankan tanggung jawab sosial, lingkungan, dan ekonomi sebagai bagian dari strategi dalam mempertahankan legitimasi di mata masyarakat dan kelangsungan bisnis (Yunan et al., 2021). Walaupun demikian, menurut Rahaditama (2022), perusahaan besar tidak selalu merilis *sustainability report* untuk memengaruhi pemangku kepentingan internal dan eksternal yang berkepentingan dengan perusahaan, ukuran perusahaan tidak selalu menjadi faktor penentu bagi perusahaan dalam merilis *sustainability report*.

Faktor selanjutnya yang turut memengaruhi pengungkapan *sustainability report* setelah profitabilitas dan ukuran perusahaan ialah *Corporate Governance* (CG). Menurut Ghozali (2020), tata kelola perusahaan merupakan kerangka mekanisme dan proses pengendalian yang mengatur distribusi hak serta tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan, sekaligus menyediakan aturan prosedural

untuk pengambilan keputusan perusahaan. Penelitian ini menggunakan dua komponen dari mekanisme internal CG, yaitu komisaris independen dan komite audit, karena kedua mekanisme ini merupakan representasi penting dari fungsi pengawasan dan pengendalian internal di dalam perusahaan, maka peneliti ingin mengetahui apakah keberadaan kedua komponen tersebut dapat memengaruhi pengungkapan *sustainability report*.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 Tahun 2014, anggota dewan komisaris yang bukan merupakan anggota emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan komisaris independen disebut komisaris independen. Dengan berkontribusi dalam memperkuat dan meningkatkan kinerja perusahaan, komisaris independen membantu meningkatkan pengawasan perusahaan dan meningkatkan kualitas informasi akuntansi yang disajikan (Mujiani & Jayanti, 2021). Menurut Yunan et al. (2021), semakin banyak jumlah komisaris independen dalam dewan komisaris, semakin kuat pula penerapan tata kelola perusahaan yang baik, yang dapat meningkatkan pelaporan keberlanjutan. Bagi para pemangku kepentingan, kehadiran lebih banyak anggota komisaris independen dalam perusahaan, dapat memberikan rasa aman bagi investor dan memungkinkan mereka berkontribusi dalam penyusunan kebijakan dan gagasan yang menguntungkan mereka.

Namun, Setiadi et al. (2023) mengungkapkan bahwa kuantitas dewan komisaris independen tidak memengaruhi luasnya pengungkapan *sustainability report*, menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dalam perusahaan, sehingga kurangnya dorongan terhadap pihak manajemen untuk mengungkapkan aspek

sosial dan lingkungan. Selain itu, minimnya pengetahuan dan pemahaman komisaris independen terhadap pentingnya *sustainability report* juga menjadi faktor yang menghambat pengungkapan *sustainability report*. Hal ini dapat disimpulkan, kualitas dari komisaris independen lebih berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* daripada kuantitasnya.

Sebagai bagian dari tugasnya, komisaris independen berwenang membentuk komite, seperti komite audit, yang membantu penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Tujuan komite audit adalah membantu manajemen menyediakan *sustainability report* yang kredibel bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat umum (Wulandari et al., 2021). Frekuensi rapat komite audit yang lebih tinggi menunjukkan pemantauan yang lebih menyeluruh, yang pada gilirannya mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi keberlanjutan secara lebih transparan (Wulandari et al., 2021). Ismi & Hendrani (2024) menambahkan bahwa rapat yang rutin dapat memperbaiki sistem pelaporan dan mendorong manajemen untuk menyajikan informasi keberlanjutan secara lebih akurat. Namun, Krisyadi & Elleen (2020) berasumsi bahwa karena pelaporan keuangan bukan isu keberlanjutan, biasanya menjadi fokus utama rapat komite audit, frekuensi rapat tersebut hanya berdampak kecil terhadap *sustainability report*. Oleh karena itu, meskipun rapat komite audit yang lebih sering membantu meningkatkan pengawasan, kualitas diskusi dan fokus yang diberikan dalam rapat tersebut menentukan seberapa besar perhatian yang diberikan terhadap *sustainability report*.

Berkembangnya penelitian terkait pengungkapan *sustainability report* menunjukkan bahwa fenomena pengungkapan *sustainability report* semakin mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Selain itu, tingginya kontribusi perusahaan sektor energi terhadap isu-isu keberlanjutan, membuat kondisi ini menjadi topik menarik untuk diteliti lebih lanjut. Berdasarkan uraian penjelasan sebelumnya, peneliti juga mengidentifikasi adanya celah penelitian berupa temuan yang saling bertentangan dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang menguji profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *corporate governance* terhadap pengungkapan *sustainability report*. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sustainability Report pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024”**.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti masing-masing pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, komisaris independen, dan komite audit terhadap *sustainability report*. Meskipun beberapa penelitian menyimpulkan adanya pengaruh positif dari keempat variabel tersebut terhadap *sustainability report*, terdapat pula penelitian yang menunjukkan hasil hubungan negatif, dan hasil penelitian tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi penelitian terdahulu. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian terkait pengungkapan *sustainability report* sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021-2024.
2. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021-2024.
3. Menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021-2024.
4. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi perusahaan di berbagai sektor, khususnya sektor energi, tentang pentingnya pengungkapan

sustainability report. Selain itu, temuan penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi terkait faktor-faktor yang mendorong pengungkapan laporan tersebut, agar ke depannya *sustainability report* dapat diungkapkan dengan lebih baik.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran investor terhadap pentingnya isu keberlanjutan dan pentingnya *sustainability report*. Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam mengevaluasi komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan, sehingga keputusan investasi yang diambil tidak hanya berbasis kinerja finansial, tetapi juga aspek keberlanjutan jangka panjang.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi tambahan dalam memperluas wawasan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Akuntansi yang berhubungan dengan *sustainability reporting*.
2. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi sekaligus membuktikan adanya kesenjangan pada penelitian terdahulu mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *corporate governance* yang diprosikan oleh komisaris independen dan komite audit, terhadap pengungkapan *sustainability report*.